

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tidak dapat disangkal bahwa pendidikan di sekolah, -- termasuk juga pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosialnya -- tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya masyarakat yang melingkupinya. Dalam hal ini dapat dipandang bahwa pendidikan pada dasarnya adalah suatu proses sosial budaya. Artinya, pendidikan dalam upayanya membentuk perilaku, menanamkan pengetahuan, proses berpikir, nilai-nilai, cara belajar, keterampilan kognisi dan sosial yang esensial, serta nilai-nilai kebenaran akan ditentukan juga oleh bagaimana pandangan masyarakatnya tentang dunia dan nilai-nilainya (*society's prevailing world view and values*). Lebih jauh dapat pula dikatakan bahwa manfaat relatif dari tujuan-tujuan dan cara-cara pendidikan tertentu (*special goals and educative means*) adalah berakar pada konteks sosial, budaya, politik, dan ekonomi di mana orang-orang belajar dan di mana institusi pendidikan itu berfungsi. Jadi tidaklah ada bagian dari proses pendidikan termasuk juga *content* dan produknya bebas dari pengaruh sosial budaya masyarakatnya. Para pendidik pasti menyadari bahwa proses belajar mengajar ikut dipengaruhi oleh *core values, beliefs, attitudes*, dan juga strategi komunikasi dan kognisi serta pola-pola bahasa dari budaya pendukungnya. Demikian juga proses pendidikan, baik itu formal maupun informal, dapat pula berkaitan dengan struktur dan sistem sosial dari masyarakat di sekitarnya, seperti dipengaruhi oleh status sosial ekonomi masyarakat, pola pergaulan teman sebaya para pebelajar, pola hubungan antara kelompok dominan dan minoritas, pola hubungan gender dalam masyarakat, serta dampak dari perkembangan teknologi terhadap masyarakat, dan lain-lain (Pai, 1990).

Kondisi proses pendidikan sosial pada sekolah-sekolah di Bali pada umumnya, dan Pendidikan IPS khususnya, mencerminkan gambaran fenomena di atas. Walaupun kurikulum Pendidikan IPS di sekolah-sekolah telah diterapkan secara nasional (termasuk di Bali), dalam praktiknya -- baik secara formal maupun dilihat dari dimensi "*hidden curriculum*"nya -- Pendidikan IPS ini tidak lepas dari pengaruh-pengaruh budaya lokal sebagaimana yang terkonstruksi melalui pengalaman budaya para pengambil kebijakan di tingkat daerah, kepala sekolah, para pendidik dan pengawas, orang tua murid dan masyarakat sebagai *stake holders*, maupun pada para murid itu sendiri. Pengaruh itu, misalnya, dapat terjadi melalui diintegrasikannya beberapa materi muatan lokal yang berorientasi pendidikan sosial budaya Bali secara formal melalui materi kurikulum

muatan lokal (Merdana, 2000); atau melalui gagasan-gagagasan pembaharuan yang dilakukan baik oleh dosen maupun guru-guru Pendidikan IPS di Bali dan yang berbasis pada nilai-nilai tradisional lokal (Lasmawan, 2001); nilai-nilai, sistem keyakinan, dan perilaku sosial budaya guru-guru yang mencerminkan pola budaya orang Bali yang dibawa ke sekolah/kelas; sistem keyakinan, nilai-nilai, sikap, dan pola komunikasi yang membentuk pola budaya orang tua murid sebagai orang Bali dalam proses pendidikan anaknya (Suryani, 1992); serta persepsi dan nilai-nilai budaya yang dibawa oleh siswa sendiri ke sekolah. Keseluruhan fenomena seperti itu jelas turut memberikan gambaran pada keunikan dan elaborasi dalam penerapan dan proses Pendidikan IPS di Bali yang dampaknya perlu diamati dan dikaji secara mendalam untuk memungkinkan diambil langkah-langkah yang progresif dan produktif untuk meningkatkan kualitas Pendidikan IPS berbasis pada model kurikulum dan pembelajaran rekonstruksi sosial (lihat, misalnya: Taba, 1962; Brameld, 1971; Sukmadinata, 2000).

Tujuan yang terakhir dalam rangka rekonstruksi sosial dalam pendidikan ini dinilai amat urgen dan mendesak seiring dengan perubahan paradigma pendidikan di Indonesia yang berorientasi pada pendidikan berbasis masyarakat luas (*broad-based education*). Harapan ini menekankan perlunya materi-materi pendidikan berbagai kecakapan hidup (*life skills*) diberdayakan kepada generasi muda agar mereka memiliki standar kompetensi yang tinggi dan tidak tercabut dari akar kehidupan sosial budaya mereka sendiri (Suryadi, 2002). Pendidikan sekolah pada umumnya, dan Pendidikan IPS pada khususnya, yang berorientasi seperti ini tidak mungkin dapat dilaksanakan jika model pendidikan di Indonesia hanya menekankan pandangan-pandangan perenialisme dan esensialisme belaka dalam pendidikan (Somantri, 2001; bandingkan juga dengan Brameld, 1971; O'neil, 2001; Van Scotter, et al., 1985) seperti yang selama ini diterapkan di Indonesia. Pendidikan di sekolah dan IPS yang sejalan dengan orientasi perubahan berbasis masyarakat luas seperti harapan di atas haruslah berorientasi pada pandangan rekonstruksionisme pendidikan atau rekonstruksionisme sosial (Somantri, 2001). Seperti dikatakan oleh Counts (dikutip oleh Van Scotter, et al., 1985: 60) bahwa: "*Reconstructionists believe that an image of the ideal society should be the basis for determining educational programs; schools should seek to educate future citizens for a society of the future, a society that is becoming rather than one that currently exists*". Lebih lanjut kaum rekonstruksionis juga berpandangan sebagai berikut.

Sekolah semestinya diabdikan kepada pencapaian tatanan demokratis yang mendunia. Secara filosofis, seorang rekonstruksionis yakin bahwa teori pada puncaknya tak terpisahkan dari latar belakang sosial dalam suatu era kesejarahan

tertentu. Pikiran, dengan begitu, adalah sebuah keluaran atau produk dari kehidupan di sebuah masyarakat tertentu di suatu waktu (O'neil, 2001:23).

Berpegang pada asumsi-asumsi serta fenomena di atas, mempelajari bagaimana konteks sosial budaya masyarakat, termasuk ideologi masyarakat yang merupakan rekonstruksi pengalaman budaya, turut mewarnai praktik proses pendidikan pada umumnya dan Pendidikan IPS di Bali khususnya adalah sangat penting, karena kajian-kajian seperti ini terutama melalui penelitian ilmiah yang bersifat komprehensif belum pernah dilakukan umumnya di Indonesia dan di Bali khususnya. Penelitian ini, dengan demikian, dimaksudkan untuk mengkaji dan mendeskripsikan bagaimana pandangan masyarakat Bali tentang dunianya, melalui ideologi *Tri Hita Karana*, turut berperan dalam proses transformasi Pendidikan IPS di Bali. Topik ini adalah relevan dengan upaya-upaya reformasi pendidikan di sekolah pada umumnya – dan Pendidikan IPS pada khususnya (Lasmawan, 2002) -- dewasa ini yang menekankan pentingnya pendidikan bagi upaya meningkatkan tanggung jawab sosial / *social responsibility* (Cross dan Price, 1992). Berdasarkan usaha reformasi ini tujuan pendidikan tidaklah hanya untuk meningkatkan pemahaman terhadap dunia keilmuan saja, tetapi yang lebih penting juga adalah bagaimana memahami kehidupan manusia itu sendiri (AAAS, 1989). Bagaimana manusia membuat pemahaman tentang dunia alamnya dan bagaimana mereka berinteraksi dengan keseluruhan tatanan makrokosmos sangat ditentukan oleh pandangan mereka tentang dunia dan nilai-nilainya. Dalam kasus ini peneliti berkesimpulan bahwa ideologi orang Bali tentang *Tri Hita Karana* serta implikasi sosial budaya dan perubahannya, yang merupakan pandangan orang Bali tentang dunia dan nilai-nilainya, secara *inherent* turut membentuk konteks sosial budaya kemasyarakatan dari proses Pendidikan IPS di Bali. Konteks sosial budaya ini, selanjutnya, akan mempengaruhi para pengambil kebijakan, pendidik, orang tua murid dan masyarakat, serta siswa di Bali dalam mengembangkan, menerapkan, serta membentuk pemahaman mereka mengenai pengetahuan ilmiah tentang dunia sosialnya sebagai diajarkan dalam pendidikan sosial pada umumnya, dan Pendidikan IPS pada khususnya, yang dimandatkan secara nasional (lihat Subagia, 2000).

## **B. Identifikasi Masalah**

### **1. Mendidik Generasi Muda Modern Berwatak Bali**

Untuk melihat bagaimana fenomena konteks sosial budaya yang dipengaruhi oleh ideologi lokal itu turut mewarnai praktik pendidikan di sekolah dan Pendidikan IPS di Bali atau di Ubud pada khususnya, peneliti menduga bahwa perlu diidentifikasi masalah-

masalah yang berkaitan dengan munculnya harapan-harapan dalam masyarakat lokal terkait dengan tujuan-tujuan pendidikan yang mendasar dari kelompok masyarakat lokal tersebut, bagaimana harapan-harapan ideal itu memberi corak pada pengembangan program dan praktik pendidikan termasuk Pendidikan IPS, serta hasil-hasil atau *output* program pendidikan yang ditimbulkannya (bisa dibandingkan dengan Trujillo, 1996; Rival, 1996). Oleh karena itulah dalam identifikasi masalah ini dikaji hubungan ketiga *setting* penelitian ini. Pertama, akan dikaji terlebih dahulu harapan masyarakat Bali untuk mendidik generasi muda berwatak Bali.

Dewasa ini hampir semua negara telah memasuki proses modernisasi dalam kehidupan masyarakatnya yang di abad ke-21 ini pula memasuki era globalisasi terutama dalam aspek-aspek kehidupan ekonomi dan kemudian meresap ke aspek-aspek sosial, politik, dan budaya (Tilaar, 1999; Micklethwait dan Wooldridge, 2000). Memasuki era informasi yang dahsyat ini sesungguhnya pula tak ada satu bangsa atau satu kelompok masyarakatpun yang menginginkan kehilangan jati diri atau identitas nasional atau tercabut dari akar budayanya sendiri (Somantri, 2001; Nagai, 1993). Pendek kata, upaya pendidikan di setiap negara yang ingin mengejar kemajuan tanpa harus tercabut dari akar budayanya akan selalu mengupayakan agar terjadi kelangsungan budayanya dengan praktik pendidikan modern agar terbentuk manusia-manusia modern yang dapat berpikir global bertindak lokal (*think globally act locally*) (Rival, 1996; Stopsky dan Lee, 1994). Pandangan ini tentu relevan dengan semangat otonomi daerah terutama otonomi bidang pendidikan yang dewasa ini sedang digalakkan oleh pemerintah Indonesia.

Karena itu, tidaklah mengherankan jika kita bertanya kepada orang Bali tentang visi pengembangan pendidikan mereka, maka mereka tentu akan mengatakan bahwa pendidikan bagi orang Bali haruslah dapat menciptakan manusia yang memiliki kecerdasan dan keterampilan yang tinggi tetapi tetap berwatak manusia Bali (Pitana, 1994; SARAD Bali, 2000; Sujana, 1994). Yang dimaksud umumnya adalah manusia Bali yang modern, tetapi tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moral religius Hindu Bali dan adat istiadat yang bersendikan keyakinan orang Bali sebagaimana tercermin dalam pandangannya tentang dunia dan nilai-nilainya, yang sebagai *core values*nya terdapat pada ideologi *Tri Hita Karana* yang meliputi ajaran tentang *parahyangan, pawongan, dan palemahan* (Gorda, 1996, Atmadja, 1996, 1997; Sujana, 1994; Bagus, 1994).

Sehubungan dengan ini, Geria (1990) seorang peneliti dan budayawan Bali, menjelaskan bahwa dari perspektif pengembangan pariwisata, masyarakat Bali memiliki karakteristik kehidupan dan potensi-potensi pokok kebudayaan Bali, antara lain: (1)

menampakkan diri sebagai satu sistem yang penuh vitalitas, selektif, dan adaptif; (2) unik dengan identitas yang jelas; (3) merupakan masyarakat dengan kebudayaan ekspresif, memiliki landasan etika dan estetika yang kuat; (4) merupakan masyarakat dengan satu sistem yang dinamik; (5) memiliki akar yang kuat dan kokoh; dan (6) memperlihatkan kekayaan variasi budaya serta kaya akan konsepsi-konsepsi yang dapat dipakai sebagai landasan kehidupan masyarakatnya, yaitu *dharmā*, *tri hita karana*, *rwa bhineda*, keseimbangan, etos kerja, *karma phala*, estetika, *yadnya*, *catur purusaha artha*, serta *taksu* dan *jengah*.

Dengan begitu, pendidikan modern di Bali tentu diharapkan dapat melangsungkan karakteristik kehidupan dan potensi-potensi pokok kebudayaan Bali yang kaya seperti di atas dengan berbingkai pada ideologi masyarakat Bali, yaitu *Tri Hita Karana*.

Tetapi, banyak pakar dan budayawan Bali juga mengatakan bahwa kini manusia dan masyarakat Bali sedang mengalami perubahan struktur sosial dan orientasi nilai budayanya. Walau di antara pakar dan budayawan Bali masih terjadi pro dan kontra, beberapa pakar menghipotesiskan bahwa manusia dan masyarakat Bali sekarang sedang berada di “persimpangan jalan”.

Perubahan-perubahan karaktareistik sosial budaya dan religius masyarakat Bali dalam dunia modern seperti sekarang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh-pengaruh kepentingan nasional dan global yang turut bekerja mempengaruhi kehidupan sosial budaya masyarakat Bali (Widja, 1989). Secara nasional, masyarakat Bali dewasa ini pada umumnya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh ideologi nasional dan pandangan hidup bangsa Pancasila serta identitas politik nasional. Sebagai bagian integral dari kekuasaan politik negara kesatuan RI, masyarakat Bali tentunya tidak dapat lagi hanya berorientasi pada cita-cita kehidupan tradisionalnya. Secara ideologis, masyarakat Bali juga mengakui dirinya sebagai masyarakat Indonesia yang berdasar pada pandangan hidup bangsa Pancasila. Dan, dari segi strategi pelaksanaan kekuasaan politik nasional, masyarakat Bali juga menjadi bagian dari satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan Indonesia. Kesadaran ini diperkuat melalui pelaksanaan sistem politik ketatanegaraan, sistem pemerintahan, sistem partai politik, dan sistem pendidikan nasional Indonesia yang berdasar Pancasila (Sukadi, 2003). Dalam kedudukan inilah manusia dan masyarakat Bali bertindak (terutama kaum terpelajarnya) sebagai agen-agen penghubung secara politis kepada pembentukan identitas nasional yang menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok, suku, atau agama (Widja, 1989).

Di samping itu, masyarakat Bali, terutama masyarakat Ubud, juga terkenal dengan pariwisata budayanya. Sebagai pusat dan model bagi pengembangan pariwisata di Indonesia, Bali memiliki beberapa sentra daerah wisata yang sangat terkenal, seperti Ubud sendiri, Sanur, Kuta, Kintamani dan Batur, Lovina, Candi Dasa, Besakih, Nusa Dua, Batu Bulan, Tampak Siring, Tanah Lot, dan sebagainya. Di antara sentra-sentra ini, Ubud adalah daerah wisata yang paling tua dan paling dominan perkembangannya dewasa ini. Sebagai konsekuensi dari keadaan ini, Bali pada umumnya, dan Ubud pada khususnya, menjadikan sektor pengembangan industri pariwisata sebagai andalan pembangunan yang ditunjang oleh sektor lain.

Sebagai daerah tujuan wisata yang sangat terkenal di Indonesia dengan pengembangan kreativitas industri pariwisatanya, masyarakat Bali sangat peka terhadap pengaruh perubahan-perubahan yang terjadi. Young (1973) mengemukakan bahwa kegiatan pariwisata dapat memberi pengaruh positif maupun negatif terhadap manusia dengan segala atribut sosial, kultural, maupun psikologis. Begitu pula kegiatan pariwisata pada masyarakat Bali, sebagai konsekuensi dari adanya interaksi masyarakat Bali dengan dunia luar, juga tidak dapat dilepaskan dari pengaruh-pengaruh kepentingan, baik kepentingan lokal terutama dari segi pemertahanan budaya, maupun pengaruh kepentingan nasional dan global. Karena itu, tidak jarang terjadi konflik kepentingan antara kepentingan lokal, nasional, dan global di Bali (Soedarsono, 1993). Adanya berbagai kepentingan yang berpengaruh tersebut tentu harus diakomodasi oleh masyarakat Bali untuk secara bijaksana, kemudian, mencari alternatif-alternatif pemecahannya yang akan melibatkan seluruh komponen masyarakat termasuk dunia pendidikan di Bali. Di sini kepentingan-kepentingan masyarakat yang berkonflik dapat saja mendorong munculnya kritik sosial yang diperlukan bagi kemajuan masyarakat; di sisi lain, dapat memunculkan tekanan-tekanan sosial untuk mempertahankan tradisi-tradisi budaya masyarakat.

Jujur harus diakui bahwa masyarakat Bali pada umumnya, dan masyarakat pariwisata Ubud pada khususnya, telah menerima pengaruh-pengaruh pariwisata baik yang bersifat positif maupun negatif. Adanya peluang kerja di sektor pariwisata dan peningkatan spesialisasi kerja telah membantu masyarakat meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini mendorong pula peningkatan kebutuhan pendidikan, terutama pendidikan di bidang pariwisata, yang secara bersama-sama kemudian dapat meningkatkan status sosial dan ekonomi masyarakat. Tidak itu saja, karena adanya interaksi kepentingan antara masyarakat dan wisatawan dalam hal kepentingan pengembangan pariwisata budaya, secara positif pula ternyata masyarakat

Bali dapat mengembangkan kehidupan budaya dan keseniannya agar dapat terus memenuhi kebutuhan para wisatawan untuk berrekreasi di Bali menikmati keindahan eksotis alam pulau Bali, berinteraksi dengan keramahtamahan masyarakatnya, dan menikmati indahnya kesenian Bali. Ini dapat dibuktikan dari munculnya lembaga-lembaga pendidikan dan seka-seka serta organisasi sosial budaya lainnya yang bertujuan mengembangkan kajian dan memajukan budaya dan kesenian Bali (Erawan, 1993).

Tetapi, pengaruh-pengaruh negatif pariwisata ternyata tidak pula bisa dihindarkan terhadap masyarakat Bali. Dengan masuknya kapitalisme modern dalam sistem pengembangan pembangunan pariwisata di Bali, ini telah berimplikasi pada mulai mudarnya nilai-nilai sosial kebersamaan dan kegotoroyongan masyarakat Bali yang diganti dengan spesialisasi, profesionalisme, individualisme, pengaruh budaya uang (dolar), kepentingan ekonomi, meningkatnya status hak milik pribadi yang mengurangi status-status hak milik komunal dalam keluarga dan dalam pemilikan oleh masyarakat desa adat, menyempitnya lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi lahan industri pariwisata, dan meningkatnya ketimpangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat antara yang tidak mampu dan yang mampu secara ekonomi (Erawan, 1993; Landrawan, 1999; Lasmawan, 2000; Soedarsono, 1993).

Pariwisata di Bali juga telah membawa pengaruh-pengaruh global. Dari segi positifnya, Bali telah dihubungkan dengan kota-kota besar di dunia yang memungkinkan masyarakat Bali dapat berinteraksi tidak hanya dengan wisatawan manca negara di Bali, tetapi masyarakat Bali sendiri telah dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan seluruh bangsa-bangsa di dunia antara lain melalui misi-misi kebudayaan dan keseniannya, promosi pariwisata dan budayanya, kepentingan kerja sama ekonomi dan bisnis, dan melalui pertukaran informasi. Semua ini dapat membuka wawasan dan cakrawala masyarakat Bali tentang kehidupan dalam masyarakat global yang saling ketergantungan. Tidak mengherankan jika masyarakat Bali sangat menghargai wisatawan, karena wisatawan bagi masyarakat Bali adalah *nyama duranegara* (saudara dari luar negeri) yang memberikan sumber penghidupan ekonomi yang lebih baik (Mantra, 1991; McKean, 1973).

Berkembangnya pengaruh global kepada masyarakat Bali tidak hanya dibawa oleh pembangunan dan aktivitas pariwisata. Kini diakui, dunia media komunikasi dan informasi yang disebut media massa juga telah membawa dampak global kepada kehidupan masyarakat Bali. Dunia media massa ditengarai telah mampu juga menciptakan citra masyarakat (*imagined community*) global yang tanpa batas kepada masyarakat Bali.

Dalam dunia citra masyarakat global inilah masyarakat Bali telah mengadopsi karakteristik kehidupan modern masyarakat global bahkan hingga terbentuknya selera masyarakat yang dipengaruhi oleh citra media itu sendiri. Inilah yang digambarkan oleh Sujana (1994:54-58) dan beberapa pakar lain sebagai terbentuknya orientasi nilai budaya yang berkarakter industri, modern progresif, budaya publik, komersial, multikultur, teknologi kontemporer, demokratis egalitarian dengan persamaan hak-hak azasi manusianya termasuk persamaan gender, divergen, estetik modern, individual, modern, materislistik, dan sekuler, tidak jelas kebalikannya, komunikasi sekunder, dan dipengaruhi oleh rekayasa makro (kekuasaan ekonomi dan politik).

Walau perubahan-perubahan sosial dan budaya memang diakui telah terjadi pada masyarakat Bali seperti di atas, beberapa pakar dan budayawan berpendapat bahwa dilihat dari segi bobot dan makna perubahan yang terjadi, baik dilihat dari kepentingan individu dan kepentingan masyarakat Bali, dinilai bahwa masyarakat Bali kini secara keseluruhan masih *ajeg* atau lestari dalam mendukung dan melaksanakan prinsip-prinsip pandangan keseimbangan hubungan antara dunia mikrokosmos (*buana alit*) dan dunia makrokosmosnya (*buana agung*) seperti yang tercermin dalam ajaran *Tri Hita Karana* (Bagus, 1975, 1994; Atmadja, 1996, Gorda, 1996; lihat juga Sukadi, 1994; Geertz dalam Abdullah, 1979; Sujana, 1994). Keajegan ini masih dimungkinkan karena masih kuatnya ikatan kekerabatan dan ikatan desa adat sebagai unsur kelembagaan yang mewadahi aktivitas sosial kemasyarakatan yang paling kuat pada masyarakat Bali masih *ajeg* bersendikan prinsip-prinsip *Tri Hita Karana* itu sendiri (Pitana, 1994). Widja (1989:15), mengutip McKean, menunjukkan bahwa dengan menggunakan konsep “terikat” (suatu ikatan sosio-kultural di antara orang Bali dalam hubungan mereka dengan orang lain dalam kerangka pengelompokan sosial atas dasar genealogi dan teritorial), McKean menjelaskan bahwa dalam kebudayaan Bali modern sekarang:

*...there is a tendency towards conervation as well as towards change, a trend towards progress and reformation as well as towards progress and modernization. It is in large measure, I believe, because of the presence of the terikat bonds that both processes can exist without ripping apart the societal or psychic fabric.*

Kenyataan-kenyataan kondisi di atas menyiratkan juga bahwa untuk mencapai pembentukan karakter manusia Bali modern, pendidikan, termasuk Pendidikan IPS, tentu memiliki peranan penting untuk mewujudkannya, di samping karena peranan pendidikan dalam keluarga maupun pendidikan sosial dalam masyarakat. Ini berarti pula bahwa Pendidikan IPS di Bali tidak dapat dilepaskan dari pengaruh perkembangan/ perubahan

sosial budaya masyarakat Bali itu sendiri. Sebagai ditegaskan oleh Nelson (dalam Shaver, 1991:332) bahwa:

*Social education, the broader purpose of social studies instruction in schools, is especially sensitive to community interests and influence. Communities are the subject of social studies inquiry, as well as the locations where social studies is taught. The positive value of community is expressed in social studies education, but critical and conflicting community values are also explored in social studies. Historical disputes, contemporary issues, and debates over the future of all forms of community are part of social studies, as are community concepts of knowledge, values, skills, behaviors, myth, and critique.*

Dalam hal ini Pendidikan IPS tentu memiliki dua tujuan yang mungkin bersifat kontradiktif. Di satu sisi dapat berfungsi mentransmisikan pola-pola berpikir, orientasi nilai, sistem keyakinan, sikap-sikap, pola komunikasi, dan pola perilaku atau beraktivitas melalui agen-agen pewaris nilai dan saluran-saluran yang memungkinkan pola-pola di atas terwariskan dari generasi terdahulu kepada siswa; di sisi lain, dapat mengembangkan berpikir kritis dan pengambilan keputusan yang rasional. Pendidikan IPS, karena itu, sebagai dikatakan oleh Gilbert, yang dikutip oleh Nelson (1991:332),: *"is a matter of great community concern because of its centrality in the development and testing of cultural, ideological, and political knowledge."*

Dari gambaran di atas jelaslah tersirat bahwa dalam konteks pendidikan IPS, muncul berbagai problema tentang bagaimana dapat dirumuskan karakteristik generasi muda modern berwatak Bali dalam konteks proses perubahan sosial budaya masyarakat Bali itu sendiri, dan bagaimana fenomena tersebut menjadi rasional dalam mengembangkan konteks sosio-kultural dan religius pengembangan program pendidikan di Bali pada umumnya dan dalam pengembangan program Pendidikan IPS pada khususnya.

## **2. Reformulasi Jati Diri dan Tujuan Pendidikan IPS**

Mengakomodasi pemikiran bahwa Pendidikan IPS sebagai proses budaya, maka Pendidikan IPS juga tidak dapat dilepaskan dari fenomena budaya yang terjadi dalam proses pendidikan di sekolah atau di kelas. Di sini, fenomena kebudayaan tidak hanya dipandang sebagai hasil karya, cipta, rasa dan karsa komponen-komponen civitas sekolah secara statis, melainkan juga segi-segi dinamikanya terutama dalam terjadinya dialektika dan konflik-konflik dalam hubungan ideologi, hegemoni, dan kebudayaan (Giroux, 1981).

Ada tiga tantangan besar dari fenomena kebudayaan, menurut inti sari pendapat para ahli, yang akan dihadapi masyarakat Bali khususnya dan masyarakat atau bangsa Indonesia pada umumnya untuk memasuki era transnasionalisme dan globalisasi di abad

ke-21. Pertama adalah tantangan memasuki era masyarakat global dengan karakteristik keterbukaan informasi sebagai akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sementara kondisi masyarakat berada pada dualisme dalam segala aspek kehidupan. Kedua, kondisi riil tuntutan reformasi dan demokratisasi yang menghendaki cita-cita, norma, sistem sosial, nilai, sikap, dan praktik demokrasi terwujud tidak saja dalam sistem dan proses pemerintahan, tetapi juga menjiwai mode kehidupan bermasyarakat yang tidak pernah lepas dari keterikatan historis serta kondisi kontekstual dan pluralitas masyarakat. Ketiga adalah tantangan sebagai suatu bangsa yang memiliki latar historis dan budaya sebagaimana tercermin dalam dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam upaya memperkuat jati diri (keselarasan antara etnosentrisme dan nasionalisme) dengan tetap mempertahankan pluralitas budaya (Gaffar, 1996, 1999; Moerdiono, 1996; Suryadi, 1999; Widja, 1989). Sejalan dengan adanya tiga tantangan ini maka fenomena kebudayaan dalam proses pendidikan IPS di sekolah memperlihatkan pula dinamika kesesuaian dan konflik-konfliknya dalam hubungan dan pergulatan antara dinamika kebudayaan agama (*fides quaerrens intellectum*) dan kebudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi (*intellectus quaerrens fidem*) (Somantri, 2001) yang secara keseluruhan kemudian mempengaruhi pula dialektika dalam pembinaan dan pengembangan kepribadian yang otonom dengan level sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai kebudayaan lokal dengan identitas etnik, kebudayaan nasional dengan identitas nasionalnya, dan kebudayaan global dengan identitas modern dan multikulturalnya (Banks, 1981; Budhisantoso, 1993; Geriya, 1993; Mattulada, 1993; Soebadio, 1993; Widja, 1993;).

Menyadari adanya fenomena budaya ini, dalam konteks pelaksanaan program Pendidikan IPS, idealnya menjadi harapan masyarakat bahwa Pendidikan IPS haruslah mampu melahirkan generasi muda yang beriman dan bertaqwa (memiliki *crada*, *bhakti*, dan *karma wacana* yang baik), menguasai ilmu pengetahuan, cerdas, dan terampil serta memiliki kepribadian yang otonom dengan kapasitas mengambil keputusan secara rasional dan bertanggung jawab. Sementara itu, di sisi lain, mereka haruslah pula memiliki komitmen atas identitas etnik yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kebudayaan lokalnya, memiliki jiwa dan kemampuan memajukan kebudayaan nasional dalam rangka pembentukan kepribadian bangsa (identitas nasional), serta mampu berpikir kritis dan kreatif dengan semangat global dan multikultural untuk meningkatkan daya saing bangsa, serta secara bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa-bangsa mampu berpartisipasi dalam memajukan nilai-nilai kemanusiaan yang universal (Banks, 1981; Cogan, et al., 1997; Tilaar, 1999).

Keempat level pembentukan identitas dalam kerangka lingkungan kebudayaannya masing-masing di atas, walau tidak dapat dipisah-pisahkan dalam implementasinya, disadari betul menimbulkan masalah-masalah yang kompleks dalam dinamika fenomena kebudayaan yang dikembangkan dalam proses pendidikan di sekolah pada umumnya dan dalam pelaksanaan program Pendidikan IPS pada khususnya. Kompleksitas masalah tersebut bukanlah hanya karena bagaimana dapat ditemukan kesesuaian ideologis yang mendasari upaya program pendidikan dalam mencapai harapan-harapan masyarakat seperti di atas, tetapi juga karena harapan-harapan di atas dalam kepentingan aplikasi pengembangan identitas kebudayaan masing-masing memang memiliki potensi konflik yang besar (Bali Post, 2004; Poespowardojo, 1986; Sukadi, 2003; Sumadi, 1988).

Dilihat dari sudut kepentingan masyarakat Bali dalam rangka pembentukan manusia berwatak Bali, maka pendidikan haruslah mampu mengupayakan terjadinya pelestarian kehidupan masyarakat dengan sistem sosial dan budaya Balinya yang berlandaskan nilai-nilai Agama Hindu (Dube, 1980; McKean, 1973; Widja, 1993). Ini tentu tidak berarti bahwa masyarakat Bali harus mengalami stagnasi dalam kehidupan sosial dan budayanya, karena itu memang tidak mungkin.

Oleh karena itu, pendidikan sekolah tentunya haruslah mencerminkan struktur sosial dan budaya masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan sekolah tidak bisa melepaskan diri dari struktur sosial dan sistem budaya masyarakatnya. Sekolah, dengan dinamika kebudayaannya, haruslah menjadi bagian yang integral dari masyarakat dan budaya Bali.

Di sini pulalah pentingnya ideologi orang Bali (*Tri Hita Karana*) dalam menanamkan kesadaran kepada setiap anggota masyarakat, termasuk generasi mudanya, bagaimana mereka memandang dunianya, kehidupan sosialnya, kehidupan budayanya, dan bahkan kehidupan dunia religi mereka sebagai suatu sistem. Ideologi dengan demikian memiliki pula fungsi edukasi dalam rangka integrasi dan pemeliharaan sistem sosial dan budaya dengan menyediakan seperangkat norma dan nilai-nilai yang menjadi dasar motivasi untuk tindakan sosial (lihat Nelson, 1991: 334-335).

Sejalan dengan pemikiran di atas, pada skala kepentingan nasional yang lebih besar ada harapan masyarakat pula bahwa pendidikan juga mampu memajukan kebudayaan nasional dan membentuk rasa identitas budaya nasional kepada generasi muda. Ini tidak berarti bahwa, bagi masyarakat Bali, generasi muda harus kehilangan identitas kebudayaan aslinya (budaya Bali). Tumbuh dan kembangnya kebudayaan nasional bagi masyarakat bangsa Indonesia tidaklah harus diartikan matinya kebudayaan

lokal atau daerah. Hal ini karena dalam konteks kebudayaan nasional, kebudayaan daerah justru menjadi akar kekayaan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional bahkan dapat didefinisikan sebagai konfigurasi integratif puncak-puncak kebudayaan daerah yang memiliki relevansi pada kepentingan kemajuan bangsa, peradaban, serta persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia (Budhisantoso, 1993; Soebadio, 1993).

Masalahnya justru sering terletak pada proses pendidikan di sekolah bagaimana hubungan kebudayaan daerah dan nasional dikonsepsikan, diletakkan statusnya pada peran dan fungsi masing-masing, serta diciptakan dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan di sekolah. Di sinilah justru awal munculnya masalah dalam menempatkan hubungan-hubungan ideologi, hegemoni, dan kebudayaan. Ada indikasi bahwa program pendidikan di sekolah justru membonceng politik ideologi nasional dan memegang kendali hegemoni, dengan dalih wacana kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan daerah, telah memberikan kesadaran palsu yang justru makin menjauhkan masyarakat, khususnya generasi muda, dari akar kebudayaan daerahnya (Abdullah, 1999; Widja, 2001).

Masalahnya bahkan menjadi lebih pelik lagi karena baik kebudayaan daerah maupun kebudayaan nasional yang diharapkan mampu membentuk identitas etnik dan identitas nasional, karena perseteruannya dalam dominasi hegemoni ideologi nasional, keduanya justru makin terhimpit oleh besarnya pengaruh kebudayaan global yang bercirikan kebudayaan komtemporer. Diawali oleh berkembangnya pengaruh kebudayaan modern yang membonceng kepentingan hegemoni kebudayaan kapitalis yang dibawa oleh dunia pendidikan barat untuk diterapkan di Indonesia, dunia pendidikan di Indonesia, termasuk di Bali, kini ternyata makin tidak mampu menciptakan kesinambungan dan makin memperbesar diskontinuitas antara kebudayaan daerah, nasional, dan kebudayaan global. Pendidikan di Indonesia dalam hegemoni wacana kebudayaan global justru dinilai oleh beberapa kalangan telah menimbulkan alienasi yang menyebabkan generasi muda Indonesia makin kehilangan jati diri etnik dan kebangsaannya, lebih-lebih lagi dengan makin menurunnya secara relatif kualitas pendidikan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

Maka munculnya kebutuhan, harapan, dan keinginan-keinginan untuk melakukan pembaharuan pada pelaksanaan sistem pendidikan nasional tampaknya tidak dapat ditawar-tawar. Adanya gagasan pembaharuan sistem pendidikan nasional yang berorientasi pada *broad-based education*, pengembangan materi pendidikan *life skills*, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, pengembangan pengelolaan dan peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah (*school-based management*) adalah bukti-

bukti munculnya kebutuhan-kebutuhan untuk reformasi pendidikan di Indonesia (Depdiknas, 2001, 2002, 2003, 2004; Suryadi, 2002).

Munculnya gagasan-gagasan seperti di atas tampaknya relevan dan sejalan dengan orientasi filosofi pendidikan rekonstruksi sosial seperti yang berkembang di Amerika dan Jepang sebagai telah dijelaskan di atas. Ini membuktikan bahwa program pendidikan sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan-kebutuhan pragmatis pengembangan struktur sosial dan sistem kebudayaan dalam masyarakat yang melingkupi dalam rangka pembentukan jati diri kemasyarakatan atau kebangsaan (Van Scotter, et al., 1985; O'neil, 2001). Soebadio (1993) menjelaskan bahwa bahkan UNESCO, sebagai badan PBB yang bergerak di bidang sosial budaya, hingga kini masih memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan dan memajukan *cultural identity* melalui pengembangan program pendidikan yang relevan di negara-negara bekas jajahan.

Pendidikan IPS sebagai bagian integral dari program-program pendidikan sekolah, sejalan dengan pembaharuan-pembaharuan program pendidikan yang berorientasi pada filsafat pendidikan rekonstruksi sosial ini tanpa mengabaikan keunggulan-keunggulan filsafat pendidikan esensialisme, telah pula melakukan pembaharuan agar lebih sejalan dengan cita-cita perubahan sosial dan budaya masyarakat. Dapat diketahui bahwa penerapan pendidikan budaya lokal, pendidikan multikultural, dan pendidikan perspektif global dalam PIPS ternyata bukanlah harapan masyarakat Indonesia semata. Di negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, Australia, negara-negara Eropa, bahkan di negara-negara Asia lainnya ketiga jenis pendidikan ini ternyata telah diintegrasikan dalam Pendidikan IPS (*Social Studies, Social Education, Social Science Education, Social Science and Environment*) mereka (Banks, 1981, 1991; Giese, Parisi, and Bybee, 1991; Hahn, 1991; Massialas, 1991; Nelson, 1991; Stopsyky and Lee, 1994; Waterworth, 1999).

Sayangnya, pelaksanaan IPS sebagai suatu program pendidikan di Indonesia belumlah mencerminkan harapan-harapan seperti telah digambarkan di atas. Jika diterima asumsi bahwa program Pendidikan IPS adalah juga sebuah proses budaya, maka ia tidaklah dapat dilepaskan pula dari proses rekonstruksi pengalaman budaya pendukungnya (guru, murid, kepala sekolah, pejabat berwenang di atasnya, pegawai, orang tua murid dan masyarakat lingkungannya). Dan ini tentunya membutuhkan upaya reformulasi jati diri dan reorientasi serta rekonstruksi tujuan-tujuan Pendidikan IPS (Somantri, 2001).

Selama ini secara resmi Pendidikan IPS di Indonesia secara kurikuler dimaknai sebagai “penyederhanaan atau adaptasi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora, serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan paedagogis /

psikologis untuk tujuan pendidikan”. Atau dalam versi lain disebutkan bahwa Pendidikan IPS adalah “seleksi dari disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta kegiatan dasar manusia yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk tujuan pendidikan” (Somantri, 2001: 92). Dari segi pembaharuan dalam upaya menyesuaikan dengan tingkat perkembangan tantangan-tantangan hidup dalam masyarakat, definisi Pendidikan IPS seperti ini tampaknya sangatlah sederhana. Kesimpulan ini tidaklah berlebihan. Bandingkan misalnya definisi ini dengan definisi *Social Studies* yang berlaku di Amerika (NCSS, 1994: 3).

Jika dibandingkan definisi Pendidikan IPS dengan makna *Social Studies*, jelaslah tampak bahwa makna *Social Studies* tampak lebih eksplisit dalam menjelaskan tujuan-tujuan pendidikannya dengan cakupan materi pendidikan yang lebih kompleks dalam mengikuti perkembangan disiplin iptek dan perkembangan masyarakat serta secara tegas menyatakan bahwa *social studies* adalah suatu pendekatan pendidikan secara terpadu. Penjelasan ini tentu tidak berarti bahwa pelaksanaan program Pendidikan IPS di Indonesia haruslah disamakan dengan program *Social Studies* di Amerika.

Namun, jika cita-cita atau harapan dalam rangka pembentukan generasi muda modern berwatak Bali seperti dijelaskan di atas hendak diwujudkan melalui kontribusi dan peran Pendidikan IPS, maka tidaklah naif untuk mereformulasi dan mereorientasi jati diri dan tujuan-tujuan Pendidikan IPS sebagaimana diharapkan. Karena itu, tampaknya perlu untuk mengkaji pelaksanaan program Pendidikan IPS di Indonesia ini sebagai suatu pendekatan budaya.

.Ada beberapa kelemahan mendasar yang terjadi dalam pelaksanaan program Pendidikan IPS di sekolah selama ini jika diharapkan sebagai suatu proses budaya dalam rangka pencapaian cita-cita perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Pertama, program Pendidikan IPS selama ini tampaknya kurang memiliki landasan filsafat ilmu dan filosofis pendidikan yang jelas, melainkan lebih dianggap sebagai *socio-political institution* yang dapat dijadikan kendaraan bagi negara dalam menanamkan kekuasaan ideologis dan politik nasionalismenya kepada warga negara (Winataputra, 2001). Kedua, praktik program Pendidikan IPS juga kurang memiliki landasan-landasan sosial budaya yang jelas dan kokoh karena lebih penting menonjolkan aspek pengajaran konsep-konsep dasar ilmu sosial yang diseleksi, diorganisasikan, dan disajikan secara ilmiah dan psikologis. Ketiga, pelaksanaan program Pendidikan IPS cenderung lepas dari konteks kemasyarakatan dan lebih menekankan penguasaan konsep-konsep keilmuan oleh siswa (Cornbleth, 1991). Keempat, dalam konteks pengembangan kebudayaan daerah/lokal, nasional, dan global,

pengembangan materi Pendidikan IPS di sekolah cenderung lebih berorientasi pada materi ruang lingkup nasional dan kurang proporsional dalam menyajikan materi-materi muatan lokal/kebudayaan daerah dan kebudayaan global atau perspektif global (Mulder, 2003). Kelima, Pendidikan IPS lebih menekankan misi sosio-paedagogis dan mengabaikan misi sosio-akademis dan sosio-kulturalnya yang memungkinkan pebelajar dapat berpartisipasi sosial secara aktif dengan cerdas dan bertanggung jawab baik di tingkat lokal, nasional, maupun global (Cogan, et al., 1997). Keenam, dalam mendidik siswa dalam aspek-aspek kemasyarakatan, kebudayaan, politik, ekonomi, hukum, tatanegara, dan pemerintahan, Pendidikan IPS lebih berorientasi pada pandangan fungsionalisme yang statis dan konservatif sehingga mengabaikan segi-segi demokrasi dan pengembangan berpikir kritis dan kreatif (Mulder, 2003). Ketujuh, Pendidikan IPS dalam pembelajarannya di kelas lebih menekankan pendekatan ekspositori dan kurang memberi arti pada makna pendidikan demokrasi dengan pendekatan-pendekatan belajar secara kelompok kooperatif dan dialog interaktifnya dengan memanfaatkan pengalaman belajar dan konsep-konsep awal siswa (Engle and Ochoa, 1988; Gandal dan Finn, seperti dikutip oleh Winataputra, 2001). Kedelapan, Pendidikan IPS di sekolah kurang mengembangkan kapabilitas belajar yang utuh dan autentik dalam seluruh bentuk kecakapan hidup potensial (personal, sosial, intelektual, akademis, dan vokasional) yang dapat dikembangkan pada diri siswa melainkan hanya menekankan kemampuan memori dan pemahaman tingkat rendah (Somantri, 2001). Akhirnya, secara keseluruhan Pendidikan IPS di sekolah menjadi kurang *powerful* (NCSS, 2000; Wahab, 2002).

Berbagai kelemahan dalam penerapan program Pendidikan IPS di atas tentu memerlukan upaya rekonstruksi dari berbagai komponen pendidikan dengan melakukan reformulasi jati diri dan reorientasi tujuan-tujuan Pendidikan IPS agar lebih sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dengan pemenuhan standar lokal, nasional, dan global. Meminjam konsep Giroux (1981), dalam mengkaji proses pendidikan di sekolah sebagai proses budaya, perlu dianalisis hubungan-hubungan antara ideologi, kebudayaan, dan proses pendidikan di sekolah itu sendiri. Stopsky dan Lee (1994:1) mengatakan bahwa PIPS bukanlah hanya pendidikan ilmu-ilmu sosial atau pelajaran sejarah kehidupan manusia masa lalu saja, tetapi juga sebagai sarana untuk membawa manusia kepada kehidupan masa depan yang menjanjikan. PIPS melibatkan pengetahuan, sikap, nilai-nilai, dan keterampilan yang memungkinkan siswa berkembang menjadi duta-duta warga negara yang bijaksana, bertanggung jawab dan efektif.

### **3. Dampak Adanya Pengaruh Masyarakat terhadap PIPS pada Siswa**

Mengkaji pengaruh masyarakat terhadap program pendidikan di sekolah pada umumnya dan Pendidikan IPS khususnya tidak akan nyata jika Pendidikan IPS itu sendiri tidak memiliki dampak terhadap siswa. Nelson (1991) mengatakan bahwa konteks sosiokultural dan ideologi yang berpengaruh terhadap *hidden curriculum* pendidikan IPS dapat mempunyai dampak terhadap siswa. Seperti Litt (1963) menyatakan bahwa siswa yang memperoleh pendidikan *civic* secara formal di sekolah lebih mendukung nilai-nilai dan cita-cita demokrasi dari pada mereka yang tidak memperolehnya yang cenderung berorientasi chauvinistik. Begitu pula konteks sosiokultural seperti klasifikasi /stratifikasi sosial, kelompok-kelompok kepentingan sosial, gender, dan kelompok etnis yang memiliki ideologinya sendiri-sendiri dan memberi pengaruh terhadap pendidikan IPS dapat memberi dampak pula terhadap sikap dan orientasi nilai sosial budaya siswa di sekolah (Nelson, 1991:333). Selanjutnya, Apple (1979) mengidentifikasi adanya dominasi secara ideologis dalam *hidden curriculum* yang membatasi siswa pada pandangan dunianya yang bersifat konservatif normatif.

Nelson, lebih lanjut, juga mengidentifikasi bahwa kepentingan agen-agen di masyarakat baik yang bersifat formal maupun informal dapat berpengaruh terhadap pendidikan IPS dan berdampak pula kepada siswa. Di sini Kirst (1984) mengidentifikasi adanya pengaruh berbagai agen di masyarakat, antara lain legislatif, eksekutif, administrasi sekolah, birokrasi, asosiasi profesional, dan kepentingan-kepentingan swasta. Pengaruh agen-agen ini dapat merupakan kepentingan politik, sosial, ekonomi/bisnis, budaya, seni, agama, stabilitas/keamanan, dan sebagainya, baik bersifat kepentingan lokal, nasional, maupun global.

Harapan kepentingan-kepentingan para agen di atas yang mewarnai *hidden curriculum* ini tentu berdampak pula pada siswa. Sebagai contoh ditemukan di Ubud, misalnya, adanya harapan-harapan dari kelompok seniman di Ubud untuk mengajak para siswa mengembangkan bakat seni tradisional dan kontemporer yang kemudian dikembangkan di sekolah melalui kurikulum muatan lokal dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah membawa dampak munculnya seniman-seniman muda Ubud yang masih berstatus siswa dengan karya-karya seni yang sudah diakui masyarakat. Begitu pula adanya pengaruh pariwisata yang menuntut masyarakat harus kreatif dan mengembangkan semangat *entrepreneur* (wirausaha) telah mendorong pentingnya pendidikan wiraswasta di sekolah dan berdampak pada terbentuknya sikap dan perilaku wiraswasta di kalangan siswa remaja di berbagai daerah wisata di Bali (Jampel, 1993).

Pengaruh masyarakat terhadap sekolah ternyata tidaklah semata-mata bersifat positif. Variasi pengaruh masyarakat dari level yang paling kecil hingga pengaruh global dapat bervalensi negatif bagi sekolah dan siswa apabila anggota-anggota masyarakat memberikan kontrol yang kuat atau melakukan sensor terhadap apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan atau diajarkan di sekolah (Nelson dan Ochoa, 1987). Pada lingkup yang paling kecil, pengaruh penerapan disiplin masyarakat yang cenderung otoriter dan feodal yang berlawanan dengan nilai-nilai kebebasan dan demokrasi dalam implementasinya di sekolah dapat menyebabkan siswa cenderung melawan dengan kebebasan melalui tindakan-tindakan pelanggaran-pelanggaran disiplin dan aturan tata tertib sekolah. Seperti diketahui bahwa banyaknya terjadi kasus tawuran massal, keterlibatan siswa pada narkoba, serta telah terjadinya hubungan seks pranikah yang dilakukan kelompok siswa diduga banyak berkaitan dengan melemahnya standar-standar moral dan agama dalam implementasinya masyarakat. Begitu pula pengaruh masyarakat modern sebagai dampak perkembangan pariwisata, misalnya, yang membawa serta nilai-nilai dan gaya hidup negatif seperti materialisme, hedonisme, individualisme, sekulerisme, paham *free sex*, alienasi, dan isolasi, dengan mengacu kepada nilai positif dalam masyarakat, telah menyebabkan sekolah harus menyelamatkan tradisi-tradisi lama yang dianggap penting bagi kelangsungan masyarakat. Dan usaha-usaha kontrol atau sensor oleh sekolah ini menjadi bagian yang sangat penting bagi pendidikan IPS di sekolah (Oliver, 1976; Popkewitz, 1984).

Dari berbagai penjelasan dan temuan di atas dapatlah disimpulkan sementara bahwa konteks lingkungan sosial dan budaya masyarakat dapat mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan program pendidikan IPS di sekolah serta terhadap *output* belajar siswa di sekolah baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh langsung itu misalnya dapat diketahui dari digunakannya sumber-sumber belajar dari konteks perkembangan sosial budaya dalam masyarakat dalam pelaksanaan program pendidikan dan pembelajaran IPS yang pada gilirannya dapat membantu siswa lebih memahami kondisi dan perkembangan kehidupan masyarakat di lingkungannya serta memiliki komitmen dan partisipasi dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial dalam masyarakat (CCE, 2002). Sementara itu, pengaruh tak langsung mungkin dapat diketahui dari adanya pandangan, keyakinan, nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat yang turut mempengaruhi iklim atau atmosfir lingkungan pendidikan dalam menentukan sifat-sifat kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*) di sekolah ternyata bisa membawa implikasi-

implikasi efek samping (*nurturant effect*) baik positif maupun negatif terhadap hasil pendidikan siswa.

Jika kesimpulan sementara ini benar, tentu dapat dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian ini bahwa konteks sosial budaya masyarakat Ubud pada khususnya dan masyarakat Bali pada umumnya baik yang menyangkut ideologinya, keyakinan dan nilai-nilainya, sikap-sikap dan tradisinya, perkembangan struktur sosial dan budayanya, serta pengaruh-pengaruh lingkungan eksternalnya (baik pengaruh di tingkat nasional maupun dalam perspektif global) akan turut mewarnai pelaksanaan program pendidikan dan pembelajaran di sekolah pada umumnya dan Pendidikan IPS pada khususnya. Pengaruh-pengaruh itu mungkin dapat dilihat dalam proses pendidikannya baik dalam pengembangan visi, misi, dan tujuan pendidikannya; pengembangan dan pengambilan kebijakan-kebijakan strategis dan operasionalnya; penciptaan iklim lingkungan pendidikannya, penentuan materi-materi pendidikannya; pelaksanaan pendekatan-pendekatan pendidikannya; hubungan-hubungan sekolah dengan masyarakatnya serta pemanfaatan sumber-sumber dukungan belajar yang ada di masyarakat; pemecahan konflik-konflik masalahnya; dan sebagainya. Lebih lanjut, sesuai dengan harapan masyarakat Bali dalam upaya pembentukan generasi muda modern berwatak Balinya, pengaruh-pengaruh konteks sosial budaya pada proses pendidikan di atas mungkin dapat pula dilihat implikasinya pada pencapaian tujuan-tujuan pendidikan dan pembelajaran IPS yang mencakup pemahaman bersama guru dan siswa tentang profil manusia Bali modern, tingkat pemahaman, nilai-nilai dan praktik kehidupan sosial budaya di kalangan siswa di lingkungan sekolah dalam penerapan ideologi *Tri Hita Karana*, serta penelusuran nilai-nilai tersebut pada minat siswa untuk melanjutkan studi dan untuk berkarya. Karena dalam pengkajian efek-efek konteks sosio budaya masyarakat terhadap pencapaian tujuan-tujuan pendidikan dan pembelajaran ini tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor demografi siswa terutama tentang jenjang kelas dan jenis kelamin siswa, maka dalam penelitian ini penting juga diketahui efek interaksi faktor-faktor demografis siswa tersebut (jenjang kelas dan jenis kelamin siswa) terhadap pencapaian tujuan-tujuan Pendidikan IPS di atas (Singarimbun dan Effendi, 1989).

### **C. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Dari deskripsi latar belakang dan identifikasi masalah di atas dapatlah difokuskan permasalahan penelitian ini pada hubungan tiga permasalahan utama, yaitu latar konteks kemasyarakatan (ideologi, sosial, dan budaya) orang Bali yang turut mewarnai praktik

pendidikan IPS di sekolah, konteks kebijakan dan implementasi pendidikan IPS itu sendiri, serta dampak pendidikan IPS yang berbasis pada konteks kemasyarakatan tersebut pada hasil belajar pendidikan IPS siswa terutama pada upaya pembentukan generasi muda modern berwatak Bali. Dari fokus penelitian seperti ini dapatlah diharapkan akan ditemukan jawaban mengapa dan bagaimana praktik pendidikan sosial atau pendidikan IPS di Bali memiliki keunikan yang membedakan dengan praktik pendidikan IPS di daerah lain.

Tidak seluruh permasalahan pada ketiga fokus penelitian di atas, tentunya, dapat diteliti dalam penelitian ini. Studi pendahuluan telah memberikan gambaran awal kepada peneliti bahwa faktor lingkungan kontekstual yang memberi kontribusi bagi pembentukan keyakinan dan orientasi nilai baik yang bersifat lokal, nasional, maupun global pada guru dan siswa, agen-agen sosial yang mempengaruhi, serta kebijakan-kebijakan pendidikan sebagai upaya alternatif dan adaptif yang diambil sekolah merupakan faktor penting lingkungan kontekstual yang perlu dijadikan fokus penelitian ini. Selanjutnya, bekerjanya proses lingkungan kontekstual ini, digunakan untuk menjelaskan pelaksanaan praktik pendidikan sosial pada umumnya dan Pendidikan IPS pada khususnya di SMU Negeri 1 Ubud. Hal terakhir inilah kemudian dinilai memberikan kontribusi pada uniknya pelaksanaan program Pendidikan IPS di SMU Negeri 1 Ubud sebagai suatu proses rekonstruksi budaya yang bernuansa Hindu Bali dengan tetap menjamin berlangsungnya kepentingan-kepentingan nasional dan bekerjanya pengaruh-pengaruh global baik melalui pengaruh lingkungan perkembangan pariwisata di Bali maupun melalui pendidikan materi muatan-muatan global pada program Pendidikan IPS.

Sejalan dengan itu, konsekuensinya pada hasil belajar siswa dilihat pula dari harapan-harapan masyarakat Bali dalam rangka pembentukan karakter manusia modern berwatak Bali yang dapat dipahami dan diterima guru dan siswa serta nilai-nilai serta lainnya yang menjelaskan keragaman makna manusia modern berwatak Bali tersebut. Kecakapan-kecakapan dan nilai-nilai tersebut, antara lain mencakup: orientasi nilai modern; literasi sosial budaya dan agama; pemahaman, orientasi nilai, dan praktik *tri hita karana* siswa; pandangan dan sikap siswa terhadap konflik kepentingan dan nilai-nilai lokal, nasional, dan global; serta kecenderungan minat siswa setelah tamat yang menggambarkan konsistensi orientasi nilai-nilai mereka, meliputi melanjutkan studi keperguruan tinggi, melamar pekerjaan sebagai pegawai atau karyawan, dan menjadi pengusaha wiraswasta. Tidak lupa dikaji pula hubungan faktor-faktor demografis siswa di

sekolah/kelas, khususnya jenjang kelas dan jenis kelamin siswa, dengan hasil-hasil pendidikan/pembelajaran di atas.

Atas dasar pembatasan fokus masalah penelitian seperti di atas disusunlah pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini yang cenderung masih bersifat umum yang memungkinkan peneliti bergerak fleksibel dalam mengeksplorasi realitas empirik yang terjadi sesuai dengan fenomena yang dihadapi (Carspecken, 1996).

## **1. Konteks Sosio-Budaya Masyarakat Bali dalam kaitannya dengan Pendidikan IPS**

Pertanyaan-pertanyaan yang segera muncul dari jabaran konteks sosio-budaya masyarakat seperti telah diuraikan di atas, antara lain adalah: (1) bagaimanakah persepsi para pendidik dan siswa SMU Negeri 1 Ubud tentang perubahan struktur sosial dan orientasi nilai budaya masyarakat Bali dewasa ini seperti yang tersirat dalam nilai-nilai, keyakinan, dan sikap mereka?; (2) bagaimanakah nilai-nilai dasar yang menjadi *core values* orang Bali dewasa ini seperti dipersepsi para pendidik IPS dan siswa SMU Negeri 1 Ubud direkonstruksi untuk kepentingan pelaksanaan proses pendidikan sosial pada umumnya dan Pendidikan IPS pada khususnya di Bali?; (3) melalui kebijakan yang bagaimanakah proses transmisi budaya Bali dan pengembangan berpikir kritis dapat mewarnai iklim proses rekonstruksi pendidikan IPS pada SMU Negeri 1 Ubud dalam mencapai tujuannya yang selaras?; (4) melalui agen-agen dan saluran serta strategi yang bagaimanakah proses transmisi budaya Bali dan pengembangan berpikir kritis itu dapat dilaksanakan dalam pendidikan sosial pada umumnya dan pembelajaran IPS pada SMU Negeri 1 Ubud pada khususnya? serta (5) seberapa efektifkah kebijakan dan tindakan-tindakan para agen melalui saluran-saluran dan strategi yang dipilih turut mempengaruhi pencapaian tujuan pendidikan IPS yang berbasis pada nilai-nilai dasar orang Bali di atas?

## **2. Praktik Pendidikan IPS pada SMU Negeri 1 Ubud**

Pertanyaan-pertanyaan penelitian yang relevan dan perlu diajukan terkait dengan konteks kedua ini antara lain adalah: (1) bagaimanakah persepsi para pendidik dan siswa SMU Negeri 1 Ubud tentang status PIPS sebagai proses enkulturasi dan akulturasi budaya?; (2) dasar-dasar filosofis (ideologis), sosiobudaya, dan psikologis yang bagaimanakah yang melandasi persepsi di atas?; (3) bagaimanakah mereka memformulasikan hakikat belajar dan tujuan-tujuan pendidikan IPS di Bali sebagai proses enkulturasi dan akulturasi budaya?; (4) muatan-muatan *content* apa dan bagaimana, baik yang mencakup fakta, konsep, generalisasi, nilai-nilai, sikap, dan keterampilan sosial yang

dirumuskan untuk menyelenggarakan program pendidikan sosial / pendidikan IPS dalam rangka mencapai tujuan pembentukan generasi muda berwatak Bali?; (5) konflik kepentingan dan nilai-nilai yang bagaimanakah dirasakan kalangan pendidik IPS dan siswa SMU Negeri 1 Ubud dalam mewujudkan program pendidikan IPS sebagai suatu proses enkulturasi dan akulturasi budaya?; (6) model/pendekatan, strategi, dan metode apakah yang digunakan para pendidik dan siswa di Bali dalam penyelenggaraan pendidikan IPS dan dalam penyelesaian konflik untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan; dan (7) sumber-sumber dan fasilitas belajar yang bagaimanakah digunakan dan dikembangkan oleh pendidik dan siswa untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan IPS sebagai proses budaya?

### **3. Pendidikan IPS dan Generasi Muda Modern Berwatak Bali**

Dari kerangka pemikiran dan kondisi-kondisi seperti diuraikan pada latar belakang dan identifikasi masalah di atas dapatlah diajukan beberapa pertanyaan penting terkait dengan dampak adanya pengaruh masyarakat terhadap pendidikan IPS pada siswa, antara lain adalah: (1) bagaimanakah pandangan guru dan siswa SMU Negeri 1 Ubud tentang karakteristik manusia modern berwatak Bali; (2) bagaimanakah orientasi nilai modern siswa SMU Negeri 1 Ubud dikaitkan dengan distribusi siswa berdasarkan jenjang kelas dan kelompok gender; (3) bagaimanakah pengetahuan sosial budaya dan agama (Hindu Bali) di kalangan siswa SMU Negeri 1 Ubud; (4) bagaimanakah pemahaman, orientasi nilai, dan praktik *tri hita karana* siswa SMU Negeri 1 Ubud di lingkungan sekolah dikaitkan pula dengan distribusi siswa berdasarkan jenjang kelas dan kelompok gender; (5) bagaimanakah pandangan dan sikap siswa dalam memecahkan isu-isu kontroversial berupa konflik antar level kepentingan masyarakat (lokal, nasional, dan global); dan (6) bagaimanakah kecenderungan minat siswa setelah tamat untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi, melamar menjadi pegawai atau karyawan, dan minat berwiraswasta dikaitkan dengan distribusi jenjang kelas dan kelompok gender.

Mencandrakan pemetaan pertanyaan-pertanyaan penelitian ini ke dalam tiga fokus masalah penelitian di atas mengindikasikan bahwa penelitian ini seakan-akan merupakan penelitian eksplorasi yang bersifat deskriptif. Tetapi, dalam realitanya tidaklah dapat dihindarkan adanya kajian eksplanasi dan argumentasi dari hubungan ketiga fokus masalah penelitian di atas karena ketiganya memang merupakan satu sistem yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Hubungan argumentatif antara ketiganya inilah yang memberikan

landasan bagi peneliti dalam pengembangan hipotesis kerja yang dianalisis secara kritis seperti yang dicandrankan dalam tujuan penelitian ini.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan fokus masalah yang diteliti dan telah dideskripsikan di atas, maka secara keseluruhan penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan pola-pola hubungan antara konteks sosial budaya masyarakat dengan penyelenggaraan program Pendidikan IPS pada SMU Negeri 1 Ubud, baik yang menyangkut konteks sosial, budaya, dan ideologi, maupun konteks perubahan sosial dan orientasi nilai budaya masyarakat Bali, serta implikasinya terhadap pencapaian tujuan Pendidikan IPS dalam rangka pembentukan generasi muda siswa modern bewatak Bali. Secara lebih spesifik penelitian ini bertujuan, antara lain sebagai berikut.

1. Menemukan prinsip-prinsip atau abstraksi yang dapat menjelaskan bagaimana ideologi, orientasi nilai-nilai budaya dan perubahan sosial masyarakat Bali dijadikan dasar dalam proses rekonstruksi penyelenggaraan program pendidikan IPS pada SMU Negeri 1 Ubud di Bali. Hal ini akan mencakup upaya pendeskripsian pengaruh konteks sosial budaya dan ideologi masyarakat Bali terhadap persepsi dan orientasi nilai para pendidik dan siswa serta terhadap pengembangan visi, misi, dan tujuan pendidikannya yang secara keseluruhan kemudian mempengaruhi pengambilan kebijakan terkait dengan proses pendidikan sosial pada umumnya dan pendidikan IPS pada khususnya; agen-agen, saluran-saluran, dan strategi yang dipilih yang mempengaruhi proses penyelenggaraan pendidikan sosial dan PIPS di sekolah; serta efektivitas kebijakan dan tindakan-tindakan yang diambil yang mencerminkan adanya pengaruh konteks sosial budaya masyarakat Bali tersebut terhadap proses pendidikan sosial dan pendidikan IPS di sekolah.
2. Menemukan karakteristik atau profil penyelenggaraan pendidikan sosial dan pendidikan IPS sebagai proses enkulturasi dan akulturasi budaya di lingkungan SMU Negeri 1 Ubud yang menunjukkan adanya pengaruh konteks sosial, budaya, dan ideologi masyarakatnya, yang tercermin dalam persepsi dan orientasi nilai para pendidik dan siswa; dasar-dasar filosofis (ideologis), sosiobudaya, dan psikologis yang melandasi persepsi dan orientasi nilai tersebut; cara para pendidik dan siswa memformulasikan hakikat belajar dan tujuan-tujuan pendidikan IPS sebagai proses budaya; pilihan materi pembelajaran; pilihan pendekatan, strategi, dan metode

pembelajaran; pilihan sumber dan fasilitas belajar pendukung; serta konflik-konflik kepentingan yang dihadapi para pendidik dan alternatif pemecahannya.

3. Menemukan prinsip-prinsip yang dapat menjelaskan hubungan antara dua fenomena di atas dengan *output*nya pada atau dampaknya terhadap hasil belajar siswa terutama dalam hal penguasaan pengetahuan sosial budaya dan agama (Hindu Bali), orientasi nilai modern dan *tri hita karana* siswa, pandangan/sikapnya dalam pemecahan konflik kepentingan, dan minat siswa setelah tamat SMU yang dikaitkan pula dengan distribusi jenjang kelas siswa dan kelompok gendernya.
4. Menemukan satu pandangan baru tentang visi, misi, tujuan, serta hakikat belajar dan pembelajaran Pendidikan IPS di tingkat sekolah menengah sebagai implikasi dari temuan-temuan di atas dengan merekonstruksi pengalaman belajar yang bersumber dari nilai-nilai agama lokal, pandangan hidup bangsa dan nilai-nilai nasional, serta dalam pemanfaatan dan pengembangan iptek.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan hasil yang dapat bermanfaat baik secara praktis maupun teoritis sebagai berikut.

1. Dalam rangka pengembangan pendidikan di daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah di bidang pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dan para pendidik di Bali untuk mengembangkan program, kurikulum, dan pembelajaran dengan model rekonstruksi sosial khususnya dalam bidang pendidikan IPS, sehingga makin mendekatkan pendidikan sekolah dengan pendidikan IPSnya pada kebutuhan dan proses perubahan sosial budaya masyarakat Bali. Harapan seperti ini relevan dengan rencana kebijakan pendidikan nasional untuk menerapkan paradigma pendidikan *broad-based education* dan pengembangan substansi pendidikan berorientasi *life skills* yang keduanya berbasis pada dukungan dan kebutuhan masyarakat (Depdiknas; 2001; Suryadi, 2002).
2. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru (konsep, proposisi, dan generalisasi yang terikat konteks sosial budaya masyarakat Bali) dalam mengembangkan hakikat, visi, misi, dan tujuan Pendidikan IPS di Indonesia yang tidak bisa dipisahkan dari pengaruh kepentingan dan perubahan sosial budaya masyarakat pendukungnya, yang selama ini cenderung hanya didefinisikan, dimaknai, diimplementasikan, dan terfokus sebagai proses pentransferan

ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang disederhanakan di sekolah untuk tujuan-tujuan pengajaran.

3. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi para pemikir dan peneliti lanjut dalam bidang Pendidikan IPS untuk memberikan masukan data, temuan konsep, proposi, dan generalisasi yang dapat digunakan sebagai refleksi awal dalam menemukan masalah-masalah baru dalam kaitannya dengan hubungan antara konteks sosial budaya kemasyarakatan dengan pelaksanaan program Pendidikan IPS di Indonesia dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan-tujuannya mengembangkan generasi muda modern yang memiliki kemampuan *think globally, act locally, and respect to the nationalism*. Ditemukannya masalah-masalah baru ini tentu akan menjadi modal awal dalam pengembangan paradigma-paradigma baru Pendidikan IPS sebagai program pendidikan dan kajian bidang ilmu serta dalam menyelenggarakan penelitian-penelitian dasar dan pengembangan lebih lanjut dengan menggunakan berbagai pendekatan untuk makin meningkatkan status keilmuan Pendidikan IPS baik secara ontologis, epistemologis, maupun aksiologis sebagai subjek kajian secara akademis.

